

Kesimpulan SI Ke-10

Contributed by Panitia SI Ke-10
 Tuesday, 25 August 2009
 Last Updated Tuesday, 25 August 2009

There are no translations available

KESIMPULAN SEMINAR INTERNASIONAL KE-10 DINAMIKA POLITIK LOKAL “Representasi Kepentingan Rakyat Pada Pemilu 2009” Kampoeng Percik, 28 – 31 Juli 2009

Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 adalah pemilu yang kesepuluh. Ada sejumlah regulasi yang diciptakan dengan harapan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong penyelenggaraan pemilu (demokrasi prosedural) agar lebih menguatkan demokrasi substansial di Indonesia. Meski demikian pada pemilu kali ini ditandai dengan berbagai persoalan, antara lain mengenai DPT, sistem pemilu yang mencampurkan dua filosofi mengenai sistem pemilihan, legitimasi partai politik, dan sebagainya. Terlepas dari persoalan yang mengiringi penyelenggaraan pemilu jumlah kontestan yang ikut berlaga dalam pemilu kali ini cukup menakjubkan. Untuk mendapat gambaran dalam angka pemilu 2009 diikuti 44 parpol, termasuk enam parpol lokal di Nangro Aceh Darusalam. Sementara itu 560 kursi yang ada di DPR RI diperebutkan oleh 11.225 kontestan. Selanjutnya, 11.998 kursi yang merupakan jumlah total kursi di semua provinsi diperebutkan tidak kurang dari 112.000 kontestan.

Besarnya jumlah kontestan ini, di satu sisi menunjukkan antusias masyarakat berlomba di arena pemilu. Dari sisi lain dapat dibaca sebagai petunjuk adanya nafsu memperoleh kekuasaan karena terbukanya peluang yang menjanjikan. Persoalannya adalah apakah nafsu yang kuat ini dilengkapi dengan kemampuan diri sebagai wakil rakyat yang harus cerdas dalam membumikan gagasan ideologi dan sekaligus sensitive terhadap persoalan martabat manusia serta lingkungannya.

Pada Seminar Internasional ke sepuluh ini, SC menjadikan Topik Pemilu Legislatif 2009 sebagai utama. Pemilu Legislatif tahun 2009 mempunyai perbedaan yang cukup menonjol baik mengenai sistem maupun prosedurnya. Dari sisi jumlah peminat, seminar kali ini merupakan seminar yang terbanyak diminati oleh para pemerhati politik lokal. Ini tercermin dari banyaknya jumlah peneliti yang memasukkan abstrak hasil penelitiannya. Jumlah abstrak makalah yang masuk ke SC sebanyak 112 abstrak makalah yang sebagian besar merupakan hasil penelitian lapangan berkaitan dengan Pemilu Legislatif 2009. Sesudah dilakukan seleksi yang ketat pada akhirnya hanya ada 37 makalah yang diundang untuk hadir dan mempresentasikan makalah hasil penelitiannya. Pelaksanaan Seminar Internasional ke sepuluh dibagi dalam empat topik pembahasan, yaitu: 1) Filosofi, Teori, dan Makna Pemilu Legislatif 2009. 2) Politik Representasi Komunikator. 3) Pesan dan Representasi Kepentingan Rakyat. 4) Peran Rakyat Dalam Merepresentasikan Kepentingan rakyat Pada Pemilu Legislatif 2009” oleh Prof. Dr. Ramlan Surbakti sebagai keynote speaker. Uraian di bawah ini merupakan rangkuman sementara hasil diskusi yang secara intens yang dibahas dalam masing-masing sesi.

Pemilu legislatif sebagai mekanisme demokrasi perwakilan, tidak cukup dipahami sebagai pelibatan rakyat dalam proses rekrutmen politik untuk memilih anggota legislatif. Ada hubungan linear diantara rakyat sebagai warga negara, partai politik, dan para wakil rakyat. Sebagai demikian anggota legislatif yang terpilih adalah wakil rakyat yang membawa kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi, yang wajib mengartikulasikan apa yang diinginkan rakyat dan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Reduksi terhadap mandat yang diberikan pada gilirannya akan membuahkan krisis legitimasi pada lembaga legislatif.

Meski masih menjadi topik yang kontroversial, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2009 telah mengubah sistem pemilu DPR dan DPRD yang dianut dalam UU No. 10 Tahun 2008. Dengan putusan MK ini penetapan calon legislatif terpilih tidak lagi ditentukan berdasarkan nomor urut melainkan suara terbanyak. Berdasarkan pandangan mengenai pola hubungan wakil rakyat-konstituen, secara teoritis, putusan MK akan mendorong terjadinya pergeseran pola hubungan anggota legislatif dengan pemilih, yaitu dari tipe partisan ke tipe politico atau delegate. Idealnya, wakil rakyat yang terpilih akan lebih mementingkan aspirasi konstituen yang memilihnya daripada instruksi partai politiknya. Mekanisme suara terbanyak juga akan dianggap mendorong sinergitas kepentingan wakil rakyat dengan konstituennya dan kecenderungan memelihara dukungan agar dapat dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Meskipun demikian dorongan pergeseran tersebut belum tentu segera terwujud karena masih adanya pranata recall oleh parpol (atau yang disebut PAW) dan pelembagaan fraksi. Kedua pranata tersebut masih terlembaga dalam Undang-undang dimana peran parpol sangat menentukan di dua pranata ini.

Pada pemilu legislatif 2009 ditandai juga dengan maraknya iklan-iklan politik yang dimuat di surat kabar. Kajian terhadap iklan-iklan politik yang pernah dimuat di surat kabar yang terbit di Jawa Tengah, yaitu Suara Merdeka, Wawasan, dan Kompas edisi Jawa Tengah memberi gambaran bagaimana para caleg mempropagandakan tanda-tanda dan aneka simbol yang dimiliki (dianggap dimilikinya). Meski iklan-iklan politik tersebut tidak ditelaah mengenai efisiensi atau akurasi pesan-pesannya, melainkan pada bagaimana pesan-pesan atau teks berinteraksi dengan masyarakat untuk menghasilkan makna tertentu (kajian semiotika), namun telah memberi ilustrasi bagaimana para caleg yang bertanding di arena pemilu ini menciptakan mitos bahwa mereka pantas dipilih sebagai wakil rakyat sembari menyembunyikan diri dari kenyataan mereka yang sesungguhnya sekaligus menutup atau melupakan realitas yang terjadi di masyarakat.

Setelah reformasi 1998, termasuk juga pada pemilu legislatif 2009, jaminan partisipasi bagi rakyat dalam menjalankan hak politiknya semakin terbuka. Boleh dikata tiap orang bisa mendirikan partai politik dan tiap orang merasa layak saja mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Kajian mengenai kisah pengalaman menjadi caleg di wilayah Kabupaten Tangerang antara lain dapat digunakan sebagai refleksi bahwa tidak adanya kriteria yang jelas tentang kemampuan dan kelayakan menjadi wakil rakyat. Seakan, setiap orang boleh dan merasa layak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, sekalipun tidak

mempunyai pengetahuan dan pengalaman politik. Diskusi mengenai topik ini juga memberi gambaran bahwa kemenangan seorang caleg dalam arena pemilu tidak berbanding lurus dengan kualitas kemampuan yang dimilikinya, melainkan lebih kepada kombinasi popularitas, uang, dan kekuasaan. Di tengah isu golput dan permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang membayangi penyelenggaraan pemilu legislatif 2009, partisipasi pemilih mempunyai makna dalam pemilu kali ini. Meski demikian partisipasi pemilih yang tinggi tidak selalu diiringi fenomena representasi kepentingan rakyat yang menjadi salah satu tiang penyangga konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak politiknya pada pemilu legislatif 2009 sekitar 73 persen (2.007.359 orang). Namun dari daerah ini, diberitakan, telah terjadi praktik pembelian suara (vote buying) oleh sebagian besar caleg yang berlaga dalam pemilu legislatif 2009. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya vote buying, antara lain regulasi yang tidak jelas, lemahnya institusi KPU dan Panwas berkelindan dengan disconnect electoral antara caleg terpilih dengan konstituennya serta karakter patron-klien yang masih kuat di wilayah pedesaan. Untuk mencegah fenomena yang telah menciderai demokratisasi ini, diperlukan upaya guna mempersempit ruang geraknya.

Meski masih ada yang mempertanyakan caleg perempuan yang terpilih pada pemilu legislatif 2009 ini lebih didasarkan pada kemampuan menyuarakan kesetaraan atau faktor yang lain, namun representasi politik perempuan yang terkait erat dengan gagasan demokratisasi lambat laun telah menunjukkan sosoknya. Kajian terhadap sejumlah regulasi yang mengatur representasi politik memberi gambaran kemajuan dan kepedulian yang lebih terhadap kesetaraan politik laki-laki dan perempuan. Penekanan kebijakan kuota yang lebih tegas, sanksi yang mulai dimunculkan serta diperkenalkannya kuota dalam partai politik adalah beberapa indikasi kemajuan kepedulian terhadap representasi politik perempuan. Oleh karena masih ada pandangan yang bias terhadap representasi politik perempuan, maka affirmative action masih merupakan hal yang urgen.

Penyelenggaraan pemilu (baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden) dapat pula dilihat sebagai proses sosial yang digerakkan oleh sebuah sistem, mekanisme atau struktur tertentu yang memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip pembagian dunia sosial. Oleh karena itu pemilu menjadi proses sosial dan arena bagi reproduksi relasi dominasi dalam masyarakat. Pertarungan politik oleh agen-agen politik professional dalam arena politik pemilu 2009 adalah untuk merebut kekuasaan politik dan kekuasaan simbolik yaitu merebut makna-makna dengan menggunakan simbol-simbol di ruang publik. Pertarungan yang terjadi, dimulai, sejak dilakukan penyusunan regulasi mengenai pemilu hingga saat penyelenggaraan pemilu melalui berbagai strategi dan cara (pemberitaan, iklan, pembentukan opini melalui survey dsb). Diskusi mengenai topik ini memberi tanda bahwa sesungguhnya penyelenggaraan pemilu yang telah berlangsung hanyalah salah satu syarat atau prosedur untuk menggapai tujuan atau cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan demikian apabila terjadi praktik-praktik yang menjauhkan dari tujuan tersebut, diperlukan upaya perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Sistem penentuan calon legislatif terpilih dalam Pemilu 2009 dengan mengacu pada suara terbanyak juga menjadi pendorong bagi para caleg untuk berkreasi melakukan kampanye dalam rangka menarik dukungan massa. Ada yang menggunakan simbol-simbol budaya dalam kampanyenya untuk membangkitkan ingatan kolektif masyarakat akan masa lalu dan memanfaatkan sentimen kedaerahan. Strategi penggunaan simbol-simbol budaya daerah yang meliputi antara lain situs (benteng dan masjid keraton), kamiana (asal-usul kekerabatan), bahasa lokal, dan busana tradisional, sebagaimana berlangsung di Bau-bau, Sulawesi Tenggara. Alasan-alasan yang muncul dengan penggunaan simbol-simbol ini adalah: ingin dikenal sebagai putra daerah, memanfaatkan struktur kekerabatan, kepedulian terhadap budaya lokal, dan ungkapan/bentuk adaptasi.

Strategi komunikasi politik dengan penggunaan simbol-simbol ini di satu sisi dapat merangkul pemilih tetapi di sisi lain justru menciptakan kesadaran sekat-sekat pada pemilih karena keanekaragaman strata dan sub etnis yang ada di kota ini.

Selain penggunaan simbol-simbol budaya, pemilu legislatif tahun 2009 ini juga diwarnai politik klientelistik yang nampak dalam aktivitas kedermawanan sosial, seperti yang dilakukan PKS di Yogyakarta. PKS memainkan pola klientelisme baru terhadap layanan-layanan yang belum direalisasikan negara. Aktivitas layanan sosial ini membuka peluang untuk mempertemukan kader PKS dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan isu-isu publik atau politik keseharian dengan suasana yang cair. Pengalaman PKS di Yogya, intensitas aktivitas kedermawanan sosial yang ditentukan oleh partai tidak berbanding lurus dengan peningkatan suara. PKS muncul sebagai patron baru karena situasi demokrasi dan pemerintah gagal untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Namun sebagai patron tidak bisa absolut karena klien bisa menilai ulang pada saat pemilu. Dampak dari pola ini adalah masyarakat menjadi lebih dewasa dan cerdas untuk menentukan pilihan. Dengan demikian terjadi perubahan pada ikatan-ikatan loyalitas sang klien dari yang bersifat personal dan ideologis menjadi berbentuk rasional dan negosiasi/resiprokal.

Hampir dalam setiap pemilu, preferensi pemilih, dikaitkan dengan teori pilah tiga (santri, abangan, priyayi) yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Kajian preferensi pemilih pada Pemilu Legislatif 2009 di Kota Kendari nampaknya menunjukkan hasil lain. Para pemilih memiliki tipologi yang rasional dan pragmatis. Mereka mempunyai pertimbangan baik obyektif maupun subyektif yang dijadikan pijakan untuk memilih.

Segala bentuk pesan politik pada intinya digunakan untuk menonjolkan diri dan menonjolkan kepentingan politik calon wakil rakyat dari pada kepentingan rakyat. Bahkan terdapat semacam "pemaksaan diri" yang dilakukan oleh para caleg dalam proses Pemilu 2009 ini dalam kaitannya pesan-pesan politik dalam melakukan kampanye. Pesan politik melalui berbagai media, dengan berbagai bentuk, berbagai cara merupakan upaya caleg lebih untuk abstraksi diri dan mempopulerkan diri saja dan bukan untuk merepresentasikan kepentingan rakyat. Pengutamaan dan penonjolan kepentingan para caleg sendiri itulah yang kemudian berpengaruh kepada rendahnya partisipasi publik untuk terlibat dalam proses politik (terjadi di Kota Palangkaraya). Kondisi geografis mempengaruhi aktivitas penyampaian pesan-pesan politik.

Selain aspek strategi dalam meraih dukungan massa, dari perpektif pemilihan Pemilu legislatif 2009 telah dijadikan sarana bagi kebangkitan identitas kelompok masyarakat yang termarginalkan. Di Buton, Sulawesi Tenggara kebangkitan identitas kelompok marginal mulai tampak dalam pemilu 1999. Sejak itu dalam Pemilu berikutnya sejumlah orang dari kelompok katobengke (satu kelompok yang dianggap "rendah"; dalam masyarakat Buton mencalonkan diri. Tujuan yang hendak dicapai dari kebangkitan identitas ini adalah

memperluas partisipasi sosial kelompok dalam ruang publik yang dirasakan tidak adil sehingga mampu menaikkan posisi tawar dalam struktur sosial. Meski tujuan yang hendak dicapai dari kebangkitan kelompok ini yaitu memperluas partisipasi sosial kelompok dalam ruang publik telah menunjukkan sosoknya namun pada Pemilu Legislatif 2009 kekompakan kelompok tercabik oleh praktek politik uang yang dilakukan oleh para caleg. Dalam Pemilu kali ini juga terjadi pelibatan para jagoan lokal dikaitkan dengan tradisi kekerasan politik. Di Bali misalnya, telah mengalami kekerasan politik yang berlangsung lama dan menjadi tradisi yang tidak terpisahkan dalam demokratisasi. Para satgas dan jagoan lokal telah berafiliasi dengan partai politik tertentu menjelma menjadi aktor politik kekerasan untuk menyebarkan rasa takut kepada orang lain yang juga sebenarnya merepresentasikan ketakutan dan kewaspadaan baru pada diri jagoan lokal tersebut. Tradisi kekerasan politik memicu bertumbuhnya kelompok organisasi kekerasan dan jagoan lokal di Bali yang pada umumnya melibatkan pemuda. Organisasi kekerasan politik telah menjadi salah satu daya tarik bagi teruna (pemuda) Bali untuk menjadi pecalang dan jagoan lokal. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu 2009 masih diwarnai dengan munculnya praktek plutokrasi, yaitu Pemilu dan hasilnya yang dikuasai oleh kelompok dan golongan tertentu. Munculnya praktek plutokrasi ini disebabkan oleh (1) kegagalan partai politik pasca reformasi mengembangkan paradigma demokrasi Indonesia yang otentik, (2) pemerintah dan elite parpol gagal membangun sistem demokrasi yang memberi peluang kepada wakil rakyat yang kompeten dan kredibel sehingga terjadi penelikungan representasi rakyat yang sesungguhnya, (3) lemahnya civil society untuk mendesakkan sistem demokrasi politik yang mampu mengakomodasi kepentingan rakyat menengah ke bawah. Hasil Pemilu 2009 lebih merepresentasikan kepentingan para elite dan pemilik modal dari pada merepresentasikan kepentingan politik rakyat menengah ke bawah. Selain itu kelompok marginal juga belum terakomodasi dalam Pemilu Legislatif 2009 sehingga ke depan perlu dipikirkan bentuk affirmative action bagi kelompok marginal dalam sistem pemilu. Dimanfaatkannya kekisruhan DPT oleh partai politik ini juga merupakan cermin putusnya kemauan masyarakat dengan partai politik. Ketika DPT bermasalah masyarakat yang paling mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkannya tetapi isu DPT ini justru digunakan oleh partai politik sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan politiknya untuk memperoleh kekuasaan. Pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu legislatif 2009 merupakan representasi partai politik dan atau para politisi. Maraknya pelanggaran dalam Pemilu 2009 ini disebabkan oleh banyak faktor yaitu: rendahnya pendidikan masyarakat, kinerja penyelenggara pemilu yang tidak independen, gagalnya partai politik memainkan perannya yang ideal, lemahnya civil society. Gagalnya pemilu sebagai sarana mendemokraskan pemerintahan justru terjadi karena penyelenggara pemilu telah berpihak. Penyelenggara pemilu dan civil society justru telah menjelma menjadi aktor yang melaksanakan modus kemenangan suara untuk caleg tertentu. Berbagai aktor tersebut berkontribusi terhadap buruknya penyelenggaraan Pileg 2009 di Maluku. Para elite politisi dan penyelenggara pemilu telah memanfaatkan lemahnya daya tawar dan kesadaran pendidikan politik masyarakat kemudian menjadikan masyarakat sebagai obyek politik. Dalam seminar tahun ini juga dipaparkan dan didiskusikan tentang perjuangan politik kelompok remaja (usia 10-25 tahun) yang tergabung dalam Youth Forum DIY melakukan upaya untuk memperoleh ruang dalam arena politik. Berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh tempat di dalam kancah politik, termasuk melakukan Voter Education bagi pemilih pemula. Perwakilan politik dibutuhkan oleh remaja untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik, dengan berbagai strategi pemberdayaan. Sebagai kelompok pemilih pemula mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman. Youth Forum merupakan kendaraan bagi remaja untuk membawa kepentingan remaja dalam politik, kebijakan pemerintah, dll. Berbagai persoalan remaja dapat di dorong kepada pihak pemerintah melalui forum ini. Pada Pemilu Legislatif 2009 peran komunikator menjadi sentral untuk menyebarluaskan jaringan. Ada banyak cara yang dilakukan komunikator untuk hal ini. Kasus diaspora dari PKS melalui kelompok pengajian dan menjadi “wong masjid” adalah salah satu contoh mengenai hal ini. Apa yang telah dilakukan oleh PKS ini telah menggeser “penghuni” lama (NU dan Muhammadiyah). Selain itu sistem sel dan metode multi level marketing dalam dakwah di wilayah Prambanan dan Klaten telah melahirkan eksklusivisme kelompok masjid yang bisa menjadi ancaman bagi kekuatan politik lain. Hal ini tampaknya telah menjadi dilema, dimana dakwah yang dahulu merupakan suatu kegiatan yang sakral, murni dan bersih untuk mendapatkan pencerahan serta untuk kepentingan agama, berubah orientasinya dimana dakwah sudah mulai dimasuki politik sehingga kepentingan agama tergeser oleh kepentingan dan keegoisan partai politik. Pesan yang disampaikan oleh komunikator lewat sejumlah media massa dan kegiatan tatap muka juga tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Kalaupun ada pesan yang mewakili mawadahi kepentingan rakyat maka pesan tersebut, sekali lagi, juga tidak terlalu dipercayai bahkan seringkali bersifat bombastis dengan membawa ideologi tertentu dan bahkan Nama Tuhan. Ketidakpercayaan pemilih dengan adanya pesan-pesan yang kadang-kadang merepresentasikan kepentingan rakyat seperti tersebut di atas, menjadi semakin mendalam (runyam) ketika sejumlah pesan yang diketengahkan oleh komunikator lebih menonjolkan pribadi yang dikaitkan dengan ikatan-ikatan primordial dan ideologi tertentu. Dengan demikian baik komunikator (parpol dan caleg) maupun pesan yang ada selama pemilu hampir tidak ada yang benar-benar secara tulus merepresentasikan kepentingan rakyat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dan di mana kesalahannya? Dalam kasus Sarikat Islam (SI) yang mempunyai basis di wilayah Banjarnegara metamorfosa dari kekuatan politik lama ini dimanfaatkan dengan baik oleh aktor berbagai partai politik. Para aktor partai politik ini saling bertukar informasi dengan cara memahami kebutuhan pemilih SI di Banjarnegara. Sementara, anggota SI secara pragmatis menyambut uluran sejumlah aktor partai politik tanpa mempertimbangkan idiologinya. Kaum perempuan yang sudah berhak memilih tak luput dari sasaran untuk dijadikan obyek politik. Selain itu caleg perempuan juga memanfaatkan dirinya dalam rangka untuk menjaring suara. Dengan mengatasnamakan perempuan nampaknya harapan pemilih perempuan telah dipelintir oleh para politisi untuk kepentingan politik memperoleh kekuasaan sebagai wakil rakyat. Sesungguhnya caleg perempuan juga sama dengan caleg laki-laki lain karena mereka sekedar mempromosikan perubahan yang tidak jelas maksudnya didalam kampanye. Dalam merepresentasikan kepentingannya, masyarakat menggunakan berbagai bentuk ekspresi kultural yang telah tersedia dan pada saat yang sama menggunakan saluran resmi yang disediakan

melalui partai politik dan pemilihan wakil. Ekspresi kepentingan tersebut didasarkan rasionalitasnya sendiri-sendiri dan rasionalitas tersebut perlu ditelaah secara hati-hati, dan rasionalitas tersebut merupakan basis untuk memperkuat peningkatan kualitas demokrasi. Pengamatan di sejumlah daerah menunjukkan adanya pergeseran perilaku memilih. Representasi politik yang sebelumnya lebih mengedepankan keterwakilan identitas kolektif semakin bergeser ke keterwakilan kepentingan, dan oleh karenanya interaksi politik lebih bersifat transaksional atau instrumental. Seiring dengan semakin kokohnya wacana Islam substantif, yang dikontraskan dengan Islam tekstual, pengamatan di komunitas yang dominan muslim di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa masyarakat semakin meninggalkan partai yang mengedepankan atribut Islam. Gejala perubahan orientasi ideologi politik juga terjadi pada Pileg 2009. Di Sumatera Barat misalnya, masa Islam bisa direbut oleh partai-partai nasionalis. Nampaknya masyarakat Sumatera Barat lebih tertarik dengan model Islam Substantif ketimbang Islam Formal. Kultur dan berbagai persoalan interen Partai Politik Islam juga mendorong masyarakat untuk berubah pilihan. Selain itu faktor penyebab kekalahan partai-partai Islam adalah citranya di mata masyarakat Sumatera Barat yang belum menggambarkan nilai-nilai Islam ideal, pemimpin/figure Partai Politik Islam yang tidak memiliki kapabilitas, kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan diragukan serta indikasi lain yaitu banyaknya kasus-kasus negatif yang melibatkan elit-elit partai Islam, seperti korupsi atau perbuatan asusila lainnya. Kabupaten Pasaman Barat merupakan kawasan persinggungan dua budaya yang berbeda, menjadi medan pertarungan politik dan pengaruh dari parpol yang berorientasi dan berakar dari tradisi kultural dari masing-masing konstituen dengan berbagai simbol-simbol budaya yang melekat sebagai identitas dan representasi politik dalam Pemilu 2009. daerah ini menjadi medan pertarungan sengit antara partai-partai nasionalis seperti partai Golkar, PDIP dan Demokrat serta PPP dan PAN yang berbasis keagamaan (Islam). Berbagai simbol budaya dan kultural yang melekat sebagai identitas dan representasi politik mereka juga ikut mewarnai seperti penggalangan massa. Meskipun cenderung bersifat emosional, sebab masih diperlukan kajian mendalam, sebab elektabilitas seorang caleg dalam perspektif orang Minang lebih bersifat rasional. Selain itu juga relasi simbol budaya dan orientasi politik terkait erat dengan identitas budaya dan politik dari masing-masing kelompok suku bangsa yang tinggal berdampingan di Minangkabau terkait dengan sikap orang Minang yang menekankan pada prinsip harmonisasi dan adaptasi. Dalam relasi pembuatan kebijakan publik, civil society dan partai politik di Indonesia mulai terbangun hubungan yang saling menghargai, menghormati dan memahami keberadaan akan perannya dalam kehidupan politik. Namun demikian, hubungan ini tidaklah mudah dicapai karena proses politik yang penuh negosiasi adalah penghalang utama bagi terciptanya hubungan yang kondusif. Civil society juga memiliki kemampuan dalam memobilisasi dukungan publik menjadi sebuah kebijakan publik. Sayangnya, civil society memiliki keterbatasan, terutama untuk mengambil peran dalam politik yaitu berada di dalam arena pemutus kebijakan. Relasi partai politik dan civil society tergantung dari konteks bagaimana kepentingan tersebut berhasil diolah dan dikelola. Relasi yang terjadi antara civil society dan partai politik berada dalam kondisi yang dinamis. 1) Ada yang berpendapat lebih baik masuk ke dalam partai dan terlibat langsung. 2) Namun banyak pula yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pertimbangan non-partisan. 3) Gagasan Blok Politik demokratik yang berusaha menyeimbangkan perbedaan kedua pandangan tersebut juga tengah dilakukan. Artinya di kalangan civil society memang sudah ada kebutuhan untuk bergerak dan mengambil peran-peran politik secara langsung, sementara itu di kalangan partai politik juga tengah memikirkan hal yang sama. Di kalangan internal civil society dan partai politik masih menyisakan banyak persoalan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Masa demokratisasi di Indonesia terlihat masih panjang karena elemen-elemennya pun masih perlu berbenah diri secara serius. Dalam istilah politik lokal di Minangkabau terdapat istilah "paga nagari, tagak nagari" (pagar negeri, bela negeri). Masyarakat mulai berhitung untuk ikut mensukseskan"anak nagari"-nya menjadi salah satu caleg dan duduk di bangku legislatif. Usaha untuk menyatukan potensi suara ini tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan elit-elit lokal (nagari) yang dalam bahasa lokal disebut dengan tigo tungku sajarang, tigo tali sapilin. Keberadaan tigo tungku sajarang, tigo tali sapilin dalam struktur politik masyarakat Minangkabau dapat dikategorikan sebagai sumber kekuasaan dan sekaligus sebagai sumber nilai. Temuan di salah satu nagari, caleg yang dalam penjangrannya mendapat rekomendasi para elit nagari, mendapatkan perlawanan dari caleg yang tidak direkomendasikan. Bahkan pada penghitungan -meskipun kesemuanya tidak terpilih- caleg yang tidak direkomendasi elit lokal memperoleh suara lebih banyak. Sementara di nagari lainnya, di mana penjangrannya dilakukan secara lebih egaliter (difasilitasi kaum muda bukan elit), terdapat caleg yang pada akhirnya terpilih. Di Bali -hal ini- sekaligus menjadi bukti masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Ironisnya budaya ini justru didukung oleh adat dan atau agama yang dijalankan dalam kehidupan keseharian mereka. Gambaran di atas menunjukkan adanya ketimpangan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ritual masyarakat Payangan. Pada sisi lain, ketimpangan tersebut menunjukkan adanya "legitimasi" semu perempuan dalam area ritual. Sebuah legitimasi yang hanya memiliki kewenangan terbatas, sebab ketika upacara ritual, tetap saja pemangku (pemimpin agama laki-laki) yang memimpin. Kepiawaiannya di dalam mengelola social capital untuk meraih dukungan suara merupakan persyaratan penting bagi sejumlah calon anggota legislatif (caleg) perempuan di Sumatera Barat. Konsistensi memelihara relasi-relasi, seperti institusi kekerabatan, para tokoh pemangku adat, serta relasi-relasi politik adalah faktor yang tidak bisa diabaikan. Sebagai perbandingan, seorang caleg perempuan yang berhasil memenangkan pemilihan pada Pemilu Legislatif 2009 berhasil mengambil alih dukungan suara dari seorang caleg incumbent di daerah pemilihan yang sama. Hal ini tidak lepas dari kemampuan sang pemenang dalam mengelola modal-modal sosial tersebut. Sistem nilai budaya lokal berperan dalam perolehan suara bagi perempuan politisi di Sumatera Barat tak terlepas dari ikatan-ikatan tradisional yang masih melekat dengan budaya Minangkabau. Bahwa hubungan emosional dengan komunitas masyarakat dan posisi jabatan adat, baik yang dimiliki politisi perempuan atau kerabat perempuan sangat menentukan dalam mendapat simpati dan suara memilih. Sebagai penutup dapat dikemukakan bahwa hasil diskusi yang terjadi selama tiga hari telah memunculkan kesadaran bahwa betapa kompleksnya persoalan pemilu. Meski secara kasar dapat dikemukakan ternyata kepentingan rakyat dimanipulasi sehingga belum terepresentasikan secara jelas. Terima Kasih atas

Partisipasi Semua Pihak Kampoeng Percik, 30 Juli 2009 Tim Perumus SI X